



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Jln. Tinaloga No. 2, Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo

www.pt-gorontalo.go.id



JL. TINALOGA NO.2 KELURAHAN DULOMO SELATAN
KEC. KOTA UTARA KOTA GORONTALO



PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Jalan Tinaloga No.2 Kelurahan Dulomo Selatan
Kota Utara, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban para Pejabat maupun yang dibawahnya terhadap publik tentang kinerja Instansi selama satu tahun anggaran yang memuat Laporan yang membandingkan target yang direncanakan dan hasil

KATA PENGANTAR



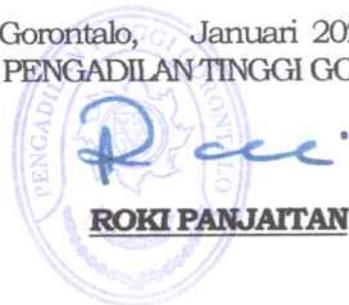
Dalam mewujudkan tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Gorontalo menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berpedoman pada Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reuiv atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang menyajikan pencapaian hasil serta analisis pencapaian sasaran program/kegiatan yang berkaitan

dengan target RENSTRA 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi ini adalah evaluasi pencapaian keberhasilan akuntabilitas kinerja, program kegiatan sesuai yang di targetkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang mengacu pada Renstra 2020-2024. Keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah wujud dari pencapaian program dan kegiatan dengan memberikan dukungan pada keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran strategis serta program kegiatan Pengadilan Tinggi Gorontalo. Dalam perjalanannya Pengadilan Tinggi Gorontalo selalu berupaya untuk menyesuaikan dinamika penugasan dan fungsi dengan Sasaran Strategis Instansi yang berdampak pada Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja 2022 untuk memberikan keberhasilan dalam pencapaian tujuan sasaran strategis dan sasaran program Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo secara akurat yang bisa di manfaatkan sebagai bahan evaluasi secara obyektif para stakeholder dan juga sebagai bahan evaluasi Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di periode Renstra 2020-2024.

Gorontalo, Januari 2023
KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO



ROKI PANJAITAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tinggi Gorontalo merupakan unit organisasi yang mandiri di bawah Mahkamah Agung RI yang melaksanakan kebijakan-kebijakan dan mendukung kinerja Mahkamah Agung RI yang memiliki visi, misi tujuan dan sasaran strategis yang sama. Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah pengadilan tingkat banding yang membawahi 4(empat) Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Marisa.

Visi dari Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah " Mewujudkan Pengadilan Tinggi Gorontalo Yang Agung " yang mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung R.I. untuk menjalankan tugas dan fungsi demi mewujudkan sasaran dan tujuan dari Pengadilan Tinggi Gorontalo yang akan menjadi tata kelola yang baik dalam berperan untuk meningkatkan pelayanan yang berintegritas terutama dalam transparansi, akuntabilitas kinerja dan untuk membantu pemerintahan dalam mencegah adanya korupsi.

Dalam mewujudkan Visi Pengadilan Tinggi Gorontalo memiliki 4 (empat) Misi yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Gorontalo;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Gorontalo ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Gorontalo ;

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut Pengadilan Tinggi Gorontalo menetapkan 3 (tiga) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran strategis, yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024.

Tujuan dari Pengadilan Tinggi Gorontalo itu adalah :

- 1) Terwujudnya kemandirian Badan Peradilan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat / pencari keadilan
- 2) Tercapainya jangkauan transparansi pelayanan Badan Peradilan.

3) Terciptanya kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia Badan Peradilan yang berkualitas dalam kepastian hukum.

Sasaran Strategis dari Pengadilan Tinggi Gorontalo yaitu :

- 1) Terwujudnya Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan rencana hasil kerja terdiri dari:
 - 1) Peningkatan Penyelesaian Perkara
 - 2) Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim
 - 3) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
 - 4) Peningkatan kualitas hasil pengawasan
 - 5) Peningkatan kualitas SDM
 - 6) Peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan
 - 7) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dukungan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Pengadilan Tinggi

Gorontalo dalam Renstra 2020-2024 di implementasikan dalam 7 sasaran strategis dengan 19 Indikator Kinerja Utama dari 7 sasaran strategis 5 diantaranya merupakan sasaran kegiatan dan dari 19 indikator 15 indikator kegiatan yang harus dicapai dan dirinci lebih lanjut sebagai target tahunan dalam perjanjian kinerja, yang dituangkan dalam laporan kinerja yang menunjukkan pencapaian sasaran kegiatan (outcome) yang menyajikan informasi realisasi kinerja yang di bandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, disertai analisis efisiensi kinerja dari SDM.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 disampaikan dengan membandingkan capaian sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan selama periode Renstra 2020-2024.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2022 menunjukkan capaian 7 sasaran kegiatan berdasarkan rencana hasil kerja dengan capaian masing-masing sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel RE.1

**Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan serta Pencapaian
Berdasarkan Rencana Hasil Kerja**

| No | Sasaran Kegiatan / IKU | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Status |
|-----------|---|--------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| 1. | Peningkatan penyelesaian perkara | | | | | |
| 1.1 | Sisa perkara Pidana, Perdata, Tipikor yang diselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.2 | Perkara yang diselesaikan tepat waktu | | | | | |
| | a. Pidana | % | 84,77 | 93,40 | 101,80 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | b. Perdata | | 84,44 | 96,36 | 114,11 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | c. Tipikor | | 83,33 | 100 | 120 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. | Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim | | | | | |
| 2.1 | Penurunan upaya hukum kasasi | % | 75,15 | 52 | 69,19 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. | Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.1 | Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan | % | 90,00 | 100 | 103,51 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. | Peningkatan kualitas hasil pengawasan | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|---|-------|-------|--------|-------------------------------------|
| 4.1 | Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti | % | 100 | 100 | 100 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.2 | Temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindak lanjuti | % | 100 | 100 | 100 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. | Peningkatan kualitas SDM | | | | | |
| 5.1 | Pegawai yang lulus diklat Teknis Yudisial | % | 50 | 100 | 100 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.2 | Pegawai yang lulus diklat Non Yudisial | % | 50 | 100 | 100 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. | Peningkatan Sarana dan Prasarana guna menunjang operasional peradilan | | | | | |
| 6.1 | Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan | % | 98,66 | 99,94 | 100,79 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.2 | Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran | % | 96,48 | 99,44 | 103,06 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | | | | | |
| 7.1 | Berkas yang diajukan banding yang | % | 100 | 100 | 100 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| | disampaikan secara lengkap | | | | | |
| 7.2 | Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis | % | 100 | 100 | 100 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.3 | Rasio Majelis Hakim dalam menangani perkara | % | 100 | 100 | 100 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Keterangan = Memenuhi Target

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa indikator kegiatan sasaran telah mencapai target, bahkan ada target yang melampaui 100% , yaitu pada Pencapaian penyelesaian perkara pidana tepat waktu yaitu 101,80%, perkara perdata 114,11% dan perkara Tipikor sebesar 120%.

Pengukuran sasaran kegiatan menggambarkan keberhasilan Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam memberikan dukungan keberhasilan kinerja Mahkamah Agung R.I. dan memberikan nilai tambah bagi mitra kerja.

Kinerja sasaran kegiatan berdasarkan rencana hasil kerja adalah :

- a.Sisa perkara yang dapat diselesaikan dengan baik
- b.Index responden Pengadilan Tingkat Pertama diwilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo terhadap pelayanan memiliki peningkatan dalam melayani, ini menunjukkan ada usaha yang signifikan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam memperbaiki kinerja khususnya dalam pelayanan pada mitra kerja di bawahnya yaitu 4 Pengadilan Negeri.
- c.Dalam transparansi dan penanganan perkara sudah memenuhi SOP telah di buat dan di reviu setiap tahunnya dan sesuai perundang-undangan dan Surat Keputusan dari Mahkamah Agung.

- d. Jumlah Kasasi dari perkara putus mengalami penurunan dan ini menyatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap putusan banding meningkat.
- e. Predikat nilai evaluasi dokumen SAKIP tahun 2021 tidak mengalami penurunan.
- f. Peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia dalam kepemimpinan, pelayanan, dan dalam prestasi kerja.
- g. Kinerja dari sasaran strategis menunjukkan kinerja yang baik
- h. Dalam penyelesaian Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor pada bulan berjalan dan

output penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun berjalan telah mengalami peningkatan dalam capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam menjalankan SAKIP mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 yaitu tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 7 |
| A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI | 7 |
| B. ISU STRATEGIS..... | 10 |
| C. SISTEMATIKA PENYAJIAN..... | 14 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 16 |
| A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024..... | 16 |
| B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022 | 24 |
| C. PERJANJIAN KINERJA..... | 27 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... | 29 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... | 29 |
| B. EVALUSI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... | 31 |
| C. REALISASI ANGGARAN..... | 45 |
| BAB IV. PENUTUP..... | 47 |
| A. KESIMPULAN..... | 47 |
| B. SARAN..... | 48 |



JL. TINALOGA NO.2 KELURAHAN DULOMO SELATAN
KEC. KOTA UTARA KOTA GORONTALO

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas :

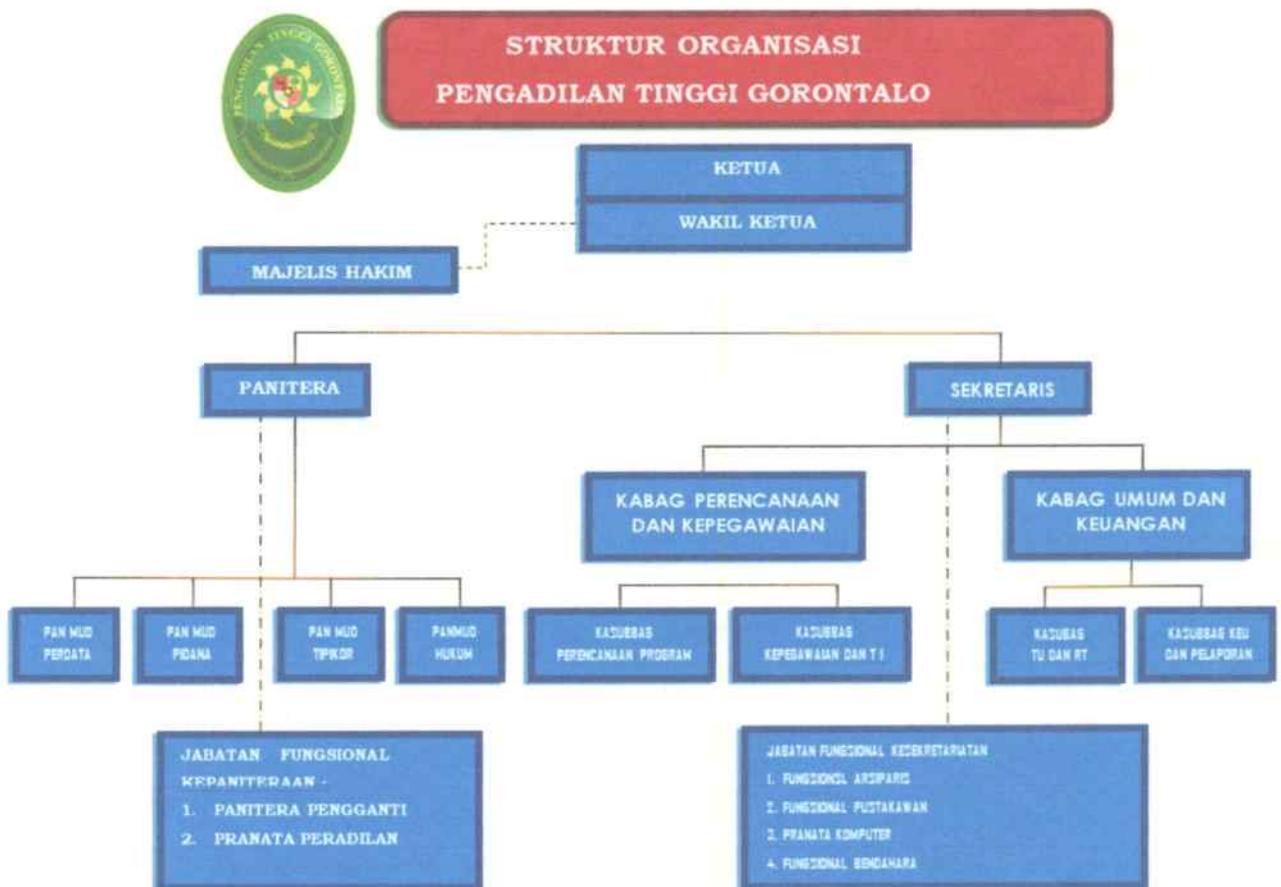
- a) Mengadili perkara perdata, pidana, tipikor pada tingkat banding. Segala perkara yang muncul Pengadilan Tinggi wajib ikut serta dalam mengadili, dimana hanya sebatas memeriksa berkas atau surat-surat yang dianggap perlu.
- b) Mengadili ditingkat pertama dan terakhir disengketa kewenangan. Maksudnya persengketaan yang terjadi di lingkup Hukum peradilan yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi.
- c) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum pada instansi Pemerintah.
- d) KPT wajib melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan di Pengadilan Negeri.

Fungsi

- a) Fungsi Mengadili, yaitu memeriksa, mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan.
- b) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c) Fungsi Pengawasan yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, pejabat struktural dan pelaksana diwilayah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Negeri.
- d) Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan umum dan keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perma Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.



URAIAN TUGAS

Tabel .2 Uraian Tugas SDM Pengadilan Tinggi Gorontalo

| URAIAN TUGAS | | |
|---|--|--|
| Ketua | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai tugas membina , mengkoordinasi dan memimpin dalam pelaksanaan tugas dari masing-masing bidang unit kerja. | | |
| Wakil Ketua | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Menggantikan Ketua bila berhalangan serta Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua. | | |
| Hakim | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Menetapkan hari sidang , memeriksa dan mengadili berkas perkara yang di berikan. Melakukan pembinaan / pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi, perkara perdata, pidana, Tipikor, bidang hukum, Pengadilan Hubungan Industrial dan bagian Kesekretariatan. | | |
| Panitera | Sekretaris | |
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemberian dukungan bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. | <ul style="list-style-type: none"> Bertugas Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi | |
| | Kabag Perencanaan Dan Kepegawaian | Kabag Umum Dan Keuangan |
| | <ul style="list-style-type: none"> Membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi | <ul style="list-style-type: none"> Membantu sekretaris dalam urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. |
| Panitera Muda Pidana | Kasub Rencana Program Dan Anggaran | Kasub Tata Usaha Dan RT |
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Pidana dan barang bukti | <ul style="list-style-type: none"> Membantu Kabag perencanaan dan kepegawaian dalam menyiapkan bahan perencanaan program, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta penyusunan laporan. | <ul style="list-style-type: none"> Membantu Kabag Umum dan Keuangan dalam penyiapan dalam urusan surat menyurat kearsipan, penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, protokol, dan Humas. |
| Panitera Muda Perdata | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Perdata | | |
| Panitera Muda Tipikor | Kasub Kepegawaian dan IT | Kasub Keuangan Dan Pelaporan |
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Pidana khusus dan barang bukti | <ul style="list-style-type: none"> Membantu Kabag perencanaan dan kepegawaian dalam peyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan TI, dan statistik pemantauan dan evaluasi, dokumentasi serta penyusunan Laporan | <ul style="list-style-type: none"> melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan. |
| Panitera Muda Hukum | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, memberikan pelayanan informasi, menyajikan Index Kepuasan Masyarakat. | | |
| Panitera Pengganti | Jabatan Fungsional | |
| <ul style="list-style-type: none"> Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang, membantu dalam hal penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan | <p>Pejabat Fungsional mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.</p> | |

B. ISU STRATEGIS

➤ Wilayah kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo

Pengadilan Tinggi Gorontalo salah satu instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung RI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Tilamuta, dan Pengadilan Negeri Marisa.

➤ Peran strategis Pengadilan Tinggi Gorontalo

Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah pengadilan tingkat banding yang membawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Provinsi Gorontalo, yang mempunyai peran sangat penting dalam mengadili perkara banding limpahan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, memberikan keterangan pertim-

undang Nomor 14 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004, diresmikan pada tanggal 28 Februari 2005.

Pengadilan Tinggi Gorontalo merupakan Lembaga Peradilan tingkat banding yang berada di wilayah Gorontalo, membawahi 4 (empat) Satuan Kerja yaitu

bangunan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta sampai peran pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama agar dapat berjalan dengan baik dan sewajarnya.

➤ Aspek Strategis Organisasi

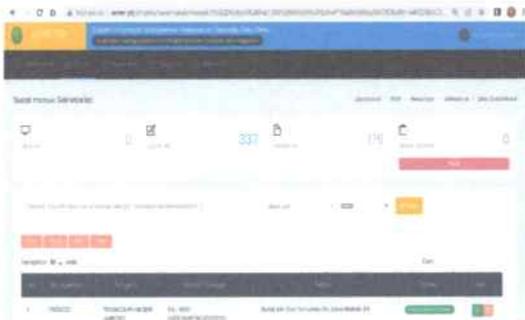
Dalam meningkatkan pelayanan Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan beberapa aspek strategis yaitu :

a) **Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan**

Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM).



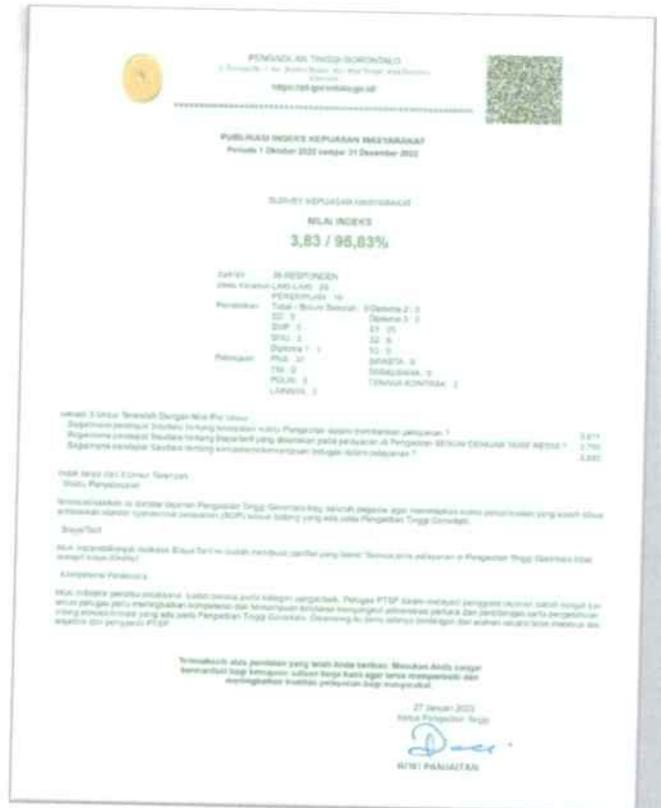
b) Membuat Inovasi dalam manajemen perkantoran: Aplikasi SIMPTSP,



yaitu aplikasi yang digunakan dalam urusan manajemen surat menyurat lewat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

Aplikasi SIPAPA,

yaitu aplikasi Permohonan Penyempahan Advokat pada Pengadilan Tinggi Gorontalo;



c) Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Index Presepsi Korupsi secara elektronik;

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang di gunakan untuk survey kepuasan masyarakat dan survey presepsi korupsi yang data-nya diolah secara elektronik.



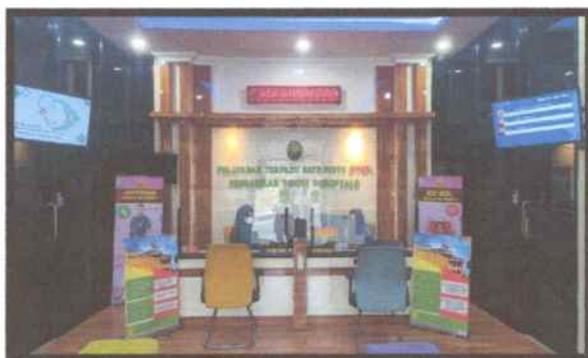
d) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelaksanaan PTSP merupakan transparansi dalam hal pelayanan yang cepat, tepat, dan terukur dari tahap awal sampai tahap akhir melalui satu pintu. sesuai pedoman SK Dirjen Badilum nomor : 77/DJU/SK/HM.03.3/2/2018 .

e) Penerapan Aplikasi E-Court;



Aplikasi E-court merupakan wadah yang berisi e-filing (pendaftaran per-



kara secara elektronik), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik),

e-summons (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik, diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018.

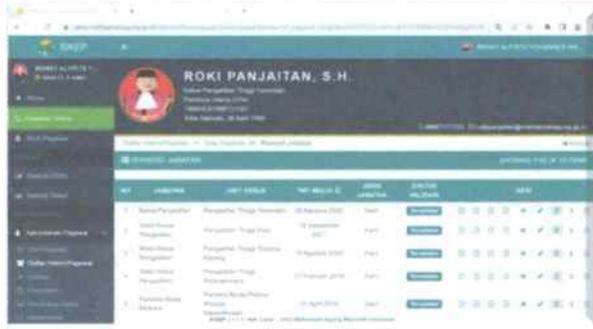
f) Pelaksanaan APM (Akreditasi Penjaminan Mutu);

REKORD
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTOR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2477/DJU/REJ/DT/01.3/12/2022
TANGGAL 9 DESEMBER 2022

| NO. | NAMA PERADILAN | TJPK | REKAS AKREDITASI 2021 | REKAS AKREDITASI 2022 | PROSEKAT |
|-----------------|-----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 1 n/A 23 | dar. | | | | |
| 24 | Pengadilan Tinggi Gorontalo | B | 735 | 735 | A |
| 25 n/A 26 | dar. | | | | |

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan program Dirjen Badilum untuk mewujudkan performa atau kinerja Peradilan Indonesia yang unggul dan prima. Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Gorontalo telah terakreditasi dan terus berkelanjutan, karena capaian kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo setiap 6 bulan di evaluasi secara berkala, untuk itu harus terus dijaga dan dipertahankan.

g) Pelaksanaan Aplikasi SIKEP;



SIKEP merupakan aplikasi pengelolaan Sumber Daya Manusia di Satuan Kerja hingga mempermudah dalam pengambilan keputusan yang terintegrasi dengan Sistem Kediklatan Mahkamah Agung (Sisdiklat) dan Sistem Pengawasan (SIWAS) dimana memberikan informasi tentang diklat yang diikuti oleh SDM satker dan dalam hal data pemeriksaan pegawai yang mempunyai hukuman disiplin.

h) Penerapan Aplikasi SIWAS



Aplikasi Siwas di kembangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 tentang pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Siwas sekarang telah memakai versi 3.0 yang ditujukan untuk publik dan juga pegawai internal yang memiliki informasi atas suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Memuat informasi tentang rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022, dimana berisi visi, misi, tujuan strategis, IKU, program dan kegiatan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kerja setiap sasaran program, indikator kinerja beserta analisisnya.

Terdiri dari sub bab:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi yaitu dengan cara :

- Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun bersangkutan;
- Membandingkan hasil capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu;

B. Realisasi Anggaran

Menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Bab IV PENUTUP

Menguraikan rangkuman capaian kinerja organisasi, sasaran program kegiatan serta rencana dan langkah strategis tindak lanjut dalam perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Melampirkan hal-hal yang dianggap perlu

Rencana Strategis 2020-2024
Rencana Kinerja
Perjanjian Kinerja



JL. TINALOGA NO.2 KELURAHAN DULOMO SELATAN
KEC. KOTA UTARA KOTA GORONTALO

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Gorontalo tahun 2020 – 2024 adalah pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun yang terencana secara sistematis dalam upaya meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja Hakim Tinggi dan seluruh ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pengadilan Tinggi Gorontalo melakukan penajaman terhadap tujuan dan sasaran strategis

yang dimana penyusunan Renstra mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI yang memuat visi dan misi dalam acuan melaksanakan tugas dan fungsi. Visi dan misi Pengadilan Tinggi Gorontalo terus dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah, serta dirumuskan pada sasaran strategis organisasi dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama dalam mengukur kinerja terutama dalam mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu pada Indikator Kinerja Mahkamah Agung yang telah di reviu berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan IKU pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.



Bagan 1. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Gorontalo

Gambaran singkat dari RENSTRA dari Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. **VISI** dari Instansi adalah **Mewujudkan Pengadilan Tinggi Gorontalo Yang Agung;**

Visi ini adalah cerminan dari cita-cita dan harapan dari Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk menjadikan instansi sebagai Lembaga Peradilan yang memiliki kehormatan, kemuliaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai yang mengadili dan memutus perkara.

2. **MISI** dari Instansi adalah :

a. **Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Gorontalo;**

Misi ini dimaksudkan Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah Lembaga Peradilan yang selalu menjaga citra hukum yang baik yaitu mempunyai kebijakan dalam upaya menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman dari segala polemik dan ancaman.

b. **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan;**

Misi ini bermaksud Pengadilan Tinggi Gorontalo akan selalu

meningkatkan pelayanan publik yang adil dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Misi ini merupakan wujud dari kepemimpinan yang tegas dan adil terhadap tugas dan fungsi dari instansi.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Misi ini mencerminkan kepercayaan masyarakat/para pencari keadilan terhadap Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Badan Peradilan yang mempunyai attitude yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dan mempunyai transparansi dalam hal pelayanan publik.

3. **TUJUAN** dari Instansi adalah :

a) Terwujudnya kemandirian Badan Peradilan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat/pencari keadilan.

b) Tercapainya jangkauan transparansi pelayanan Badan Peradilan.

c) Terciptanya kepemimpinan dan SDM Badan Peradilan yang berkualitas dalam kepastian hukum.

Dalam mewujudkan tujuan ini Pengadilan Tinggi Gorontalo lebih fokus dalam penajaman pelaksanaan Visi dan Misi untuk diterapkan dalam program kegiatan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Sasaran maupun kegiatan berdasarkan Rencana Hasil Kerja.

❖ SASARAN STRATEGIS

Bentuk dukungan Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam mewujudkan tujuan yaitu dengan mempertajam lagi dalam peningkatan kinerja yang berporos pada pengukuran hasil dari tiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam IKU. Sasaran Strategis dari Pengadilan

Tinggi Gorontalo berdasarkan rencana hasil kerja ada 7 (tujuh) sasaran yaitu :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran adalah:

- a. Persentase sisa perkara pidana, perdata, tipikor yang diselesaikan
- b. Persentase perkara pidana, perdata, tipikor yang akan diselesaikan

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran adalah:

- a. Persentase penurunan upaya hukum Kasasi

3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran adalah:

- a. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

4. Peningkatan kualitas hasil pengawasan

Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran adalah :

- a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti
- b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti

5. Peningkatan kualitas SDM

Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran adalah :

- a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
- b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

6. Peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang operasional Peradilan

Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran adalah :

- a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan
- b. Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran adalah:

- b. Persentase Perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.
- c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
- d. Persentase Rasio Majelis Hakim dalam menangani perkara

7. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

❖ PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam mewujudkan suatu tujuan dan sasaran strategis di sesuaikan dengan Program dan Kegiatan Mahkamah Agung RI yaitu :

1) Program Sasaran :

Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Kegiatan Sasaran :

- a. Peningkatan Penyelesaian Perkara
- b. Peningkatan Aksepsibilitas putusan Hakim
- c. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja yang menunjang program dan kegiatan ini adalah :

1. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan
2. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
3. Persentase sisa perkara Tipikor yang diselesaikan
4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
5. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
6. Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu
7. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan layanan peradilan

8. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
9. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan se-cara lengkap
10. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
11. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

2) Program Sasaran :

Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Sasaran :

- a. Peningkatan Kualitas Pengawasan
- b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Access to justice)
- c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- d. Peningkatan Sarana Dan Prasarana guna menunjang operasional peradilan

Indikator Kinerja yang menunjang program dan kegiatan ini adalah :

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak-lanjuti
3. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

❖ INDIKATOR KINERJA UTAMA

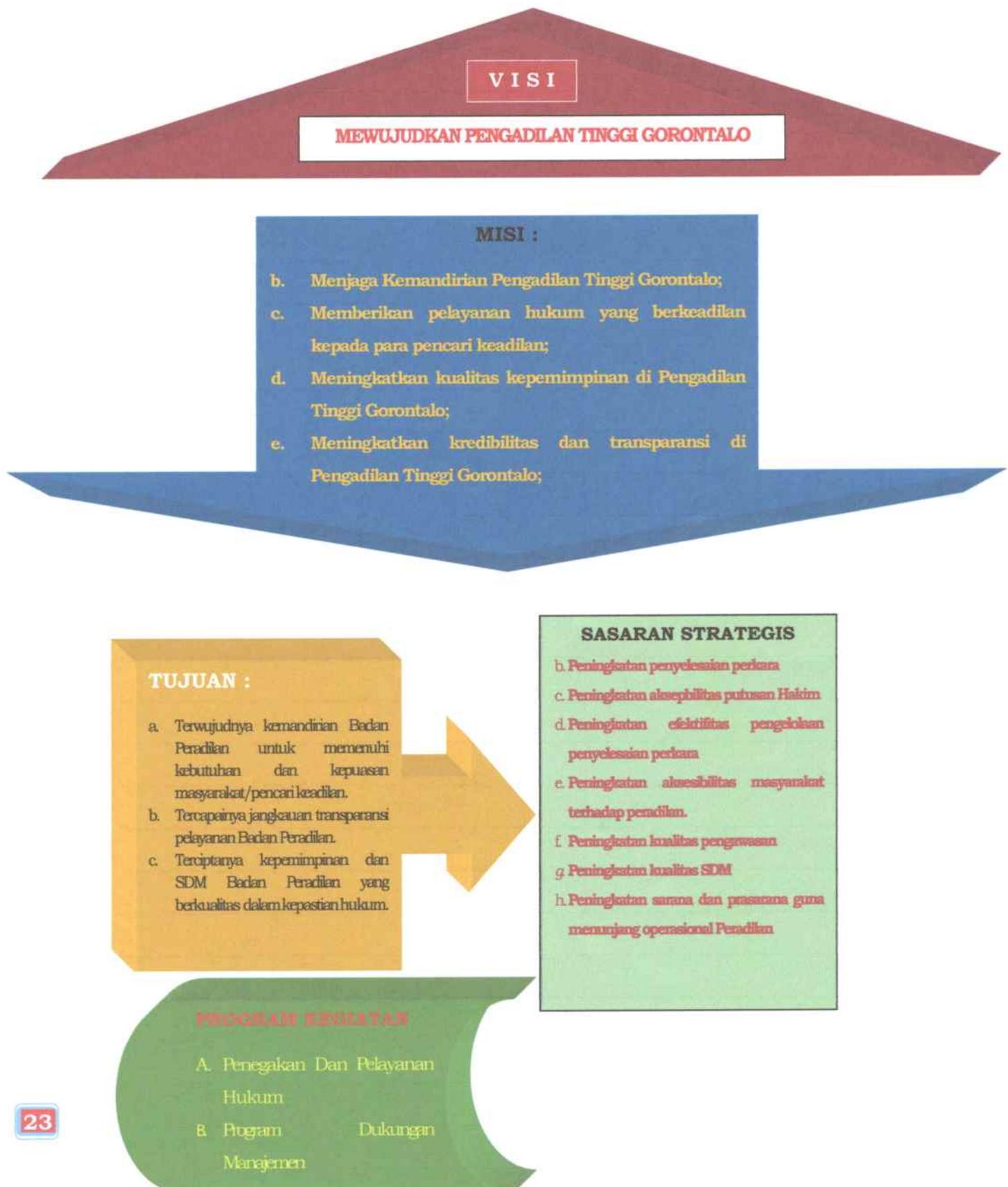
Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama telah melakukan Rapat bersama Pimpinan dan Tim Penyusun LKjIP, dan atas kesepakatan bersama telah di buat Surat Keputusan Penetapan IKU nomor : W20.U/1664.a/OT.01.1/9/2022 pada tanggal 12 September 2022.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur dalam

keberhasilan pencapaian suatu Sasaran Strategis dalam mewujudkan suatu tujuan. Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2022 telah di reviu untuk mempertegas sasaran strategis.

Berikut ini adalah Frame Work Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Gorontalo :

Bagan. 2 Frame work PT. Gorontalo



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana kinerja
Pengadilan Tinggi

WORK
the



Gorontalo dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja untuk menghasilkan suatu output/outcome yang memuat angka target kinerja tahun 2022 untuk setiap sasaran strategis. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus di capai dalam tahun 2022, dan 2 penetapan kesepakatan

tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Instansi yang akan di tuangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo tahun 2022

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|---------------------------------------|---|--|-----------|---------------|--|
| 3 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan | Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan | 90% | | | | | | |
| 4 | Peningkatan Kualitas Pengawasan | a Persentase Pengaduan yang dilaporkan yang ditindak lanjuti | 100% | Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum | Pembinaan dan Pemeriksaan Teknis dan Administrasi Tingkat Banding | Manajemen dalam penyelesaian Pengawasan dan pemeriksaan | 4 Layanan | 64.350.000,- | |
| | | b Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | 100% | | | | 4 LHP | | |
| 5 | Peningkatan Kualitas SDM | a Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial | 50% | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara | Bimbingan Teknis ASN terkait Percepatan Penyelesaian Perkara | 1 Layanan | 102.980.000,- | |
| | | b Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial | 50% | Program Dukungan Manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Dukungan Manajemen Internal | 1 Layanan | 255.499.000,- | |
| 6 | Peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan | a Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan | 98,66% | Program Dukungan Manajemen | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Layanan sarana dan prasarana internal | 1 Layanan | 344.500.000,- | |
| | | b Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran | 96,48% | | | | | | |

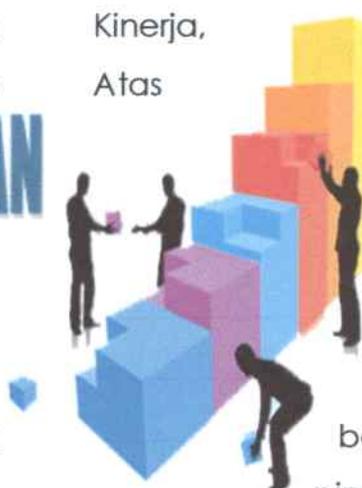
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------|--|--|--|--|--|
| 7 | Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a | Persentase Berkas Perkara yang telah diregister disampaikan ke Majelis Hakim | 100% | | | | | |
| | | b | Persentase Ratio Majelis Hakim dalam menangani Perkara. | 100% | | | | | |

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

PERJANJIAN KINERJA



Kinerja,
Atas

dan Tata Cara Reviu Laporan Instansi Kinerja Pemerintah Perjanjian Kinerja (PK) adalah merupakan dokumen yang berisikan penugasan pimpinan atas pada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Tabel. 2. PERJANJIAN KINERJA

| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET |
|----|--|---|---------|
| 1 | Peningkatan penyelesaian perkara | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | |
| | | a. Pidana | 100% |
| | | b. Perdata | 100% |
| | | c. Tipikor | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | |
| | | a. Pidana | 84,77 % |
| | | b. Perdata | 84,44 % |
| | c. Tipikor | 83,33 % | |
| 2 | Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim | Persentase penurunan upaya hukum Kasasi | 75,15% |

| | | | |
|---|---|--|--------|
| 3 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan | Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan | 100% |
| 4 | Peningkatan kualitas hasil pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti | 100% |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti | 100% |
| 5 | Peningkatan Kualitas SDM | a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial | 50% |
| | | b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial | 50% |
| 6 | Peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan | a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan | 98,66% |
| | | b. Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran | 96,48% |
| 7 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap | 100% |
| | | b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis | 100% |
| | | c. Persentase Rasio Majelis Hakim dalam menangani perkara | 100% |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
|----|---|----------------------|
| 1 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. 15.475.118.000,- |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. 344.500.000,- |
| 3 | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 243.185.000,- |



JL. TINALOGA NO.2 KELURAHAN DULOMO SELATAN
KEC. KOTA UTARA KOTA GORONTALO

B A B III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, yang mencakup penilaian Indikator Kinerja Sasaran yang biasanya didasarkan pada target dan realisasi

dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, index, rata-rata angka dan jumlah.

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo merupakan komitmen yang dipertanggung jawabkan yang memuat realisasi di bandingkan dengan target yang ditetapkan untuk capaian kinerja yang diperjanjikan

❖ RINGKASAN KINERJA PENGADILAN TINGGI GORONTALO TAHUN 2022

Hasil Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo atas sasaran strategis yang dijabarkan pada Indikator Kinerja berdasarkan rencana hasil kerja terdapat, rata-rata pencapaian adalah diatas dari target yang telah ditetapkan.

Tabel.3 Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2022

| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|----------------------------------|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Peningkatan penyelesaian perkara | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | | | |
| | | a. Pidana | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Perdata | 100% | 100% | 100% |
| | | c. Tipikor | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | | | |
| | a. Pidana | 84,77 % | 100% | 101,80% | |

| | | | | | |
|---|---|--|---------|--------|---------|
| | | b. Perdata | 84,44 % | 100% | 114,11% |
| | | c. Tipkar | 83,33 % | 100% | 120% |
| 2 | Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim | Persentase penurunan upaya hukum Kasasi | 75,15% | 52% | 69,19% |
| 3 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan | Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan | 90% | 100% | 103,51% |
| 4 | Peningkatan kualitas hasil pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Peningkatan Kualitas SDM | a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial | 50% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial | 50% | 100% | 100% |
| 6 | Peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan | a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan | 98,66% | 99,94% | 100,79% |
| | | b. Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran | 96,48% | 99,44% | 103,06% |
| 7 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis | 100% | 100% | 100% |
| | | c. Persentase Rasio Majelis Hakim dalam menangani perkara | 100% | 100% | 100% |

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa indikator telah berhasil mencapai bahkan melebihi target sesuai yang ditetapkan. Tapi 1 Indikator yang belum memenuhi capaian target yaitu persentase perkara Perdata yang di selesaikan tepat waktu.

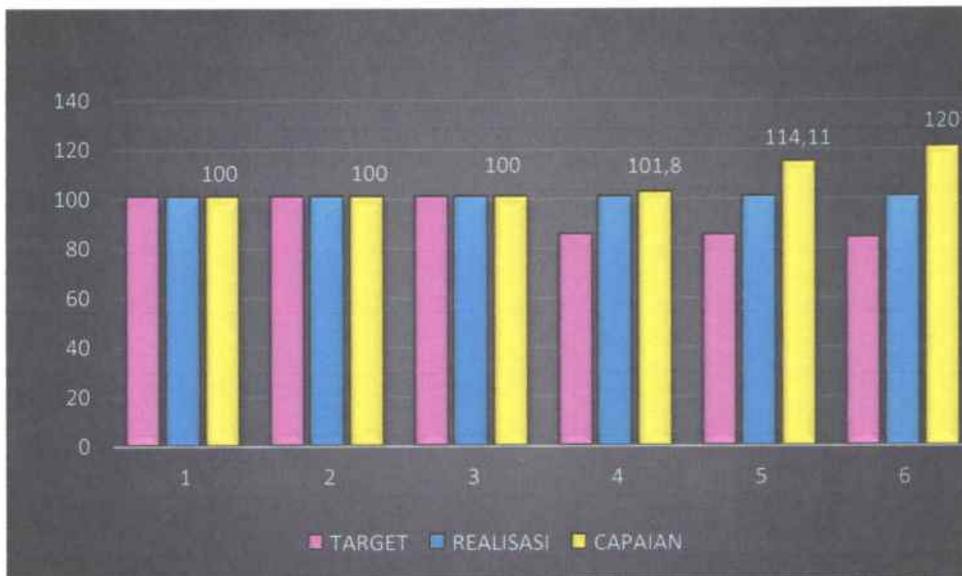
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi pada Sasaran Strategis 1

Peningkatan Pada Penyelesaian Perkara dengan menggunakan 6 Indikator Kinerja.

Sasaran ini merupakan tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Gorontalo dari sisa perkara tahun sebelumnya sampai penyelesaian perkara tepat waktu dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan
2. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan
3. Persentase sisa perkara Tipikor yang diselesaikan
4. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
5. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
6. Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu



Grafik 1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran 1 Indikator Kinerja 1

Persentase Sisa Perkara Pidana Yang diselesaikan

Indikator Kinerja "Persentase Sisa Perkara Pidana yang di selesaikan" adalah perbandingan jumlah sisa perkara Pidana yang di selesaikan dengan jumlah sisa perkara Pidana yang harus di selesaikan. Jumlah sisa perkara itu adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya.

Adanya sisa perkara pada umumnya di sebabkan karena adanya berkas perkara yang masuk di akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan, sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2022 realisasi persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan dapat mencapai target 100%, dimana jumlah sisa perkara Pidana ditahun 2021 adalah 3 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan ditahun 2022.

Berikut realisasi persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan sejak tahun 2020-2022. Ditabel ini menunjukkan bahwa dalam setiap tahun Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat menyelesaikan sisa perkara ditahun sebelumnya.

| Indikator Kinerja | Tahun | Sisa Perkara | Sisa Perkara Yang Harus Di selesaikan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|-------|--------------|---------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase Sisa Perkara Pidana yang di selesaikan | 2020 | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% |
| | 2021 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% |
| | 2022 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% |

Tabel.4 Sasaran 1 Indikator Kinerja 1

Sasaran 1 Indikator Kinerja 2

Persentase Sisa Perkara Perdata Yang diselesaikan

Indikator Kinerja "Persentase Sisa Perkara Perdata yang di selesaikan" adalah perbandingan jumlah sisa perkara Perdata yang di selesaikan dengan jumlah sisa perkara Perdata yang harus di selesaikan. Jumlah sisa perkara itu adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya.

Adanya sisa perkara pada umumnya di sebabkan karena adanya berkas perkara yang masuk di akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan, sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2022 realisasi persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan dapat mencapai target 100%, dimana jumlah sisa perkara Pidana ditahun 2020 adalah 1 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan ditahun 2022.

Berikut realisasi persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan sejak tahun 2019-2022. Ditabel ini menunjukkan bahwa dalam setiap tahun Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat menyelesaikan sisa perkara ditahun sebelumnya.

Tabel.5 Sasaran 1 Indikator Kinerja 2

| Indikator Kinerja | Tahun | Sisa Perkara | Sisa Perkara Yang Harus Di selesaikan | Target | Realisasi | Capaian |
|--|-------|--------------|---------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase Sisa Perkara Perdata yang di selesaikan | 2020 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% |
| | 2021 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| | 2022 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |

Sasaran 1 Indikator Kinerja 3

Persentase Sisa Perkara Tipikor Yang diselesaikan

Indikator Kinerja "Persentase Sisa Perkara Tipikor yang di selesaikan" adalah perbandingan jumlah sisa perkara Tipikor yang di selesaikan dengan jumlah sisa perkara Tipikor yang harus di selesaikan. Jumlah sisa perkara itu adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya.

Adanya sisa perkara pada umumnya di sebabkan karena adanya berkas perkara yang masuk di akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan, sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2022 realisasi persentase sisa perkara Tipikor yang diselesaikan dapat mencapai target 100%, dimana jumlah tidak ada sisa perkara Tipikor ditahun 2021 yang di diselesaikan ditahun 2022.

Berikut realisasi persentase sisa perkara Tipikor yang diselesaikan sejak tahun 2020-2022. Ditabel ini menunjukkan bahwa dalam setiap tahun Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat menyelesaikan sisa perkara ditahun sebelumnya.

Tabel.6 Sasaran 1 Indikator Kinerja 3

| Indikator Kinerja | Tahun | Sisa Perkara | Sisa Perkara Yang Harus Di selesaikan | Target | Realisasi | Capaian |
|--|-------|--------------|---------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase Sisa Perkara Tipikor yang di selesaikan | 2020 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| | 2021 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| | 2022 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |

Sasaran 1 Indikator Kinerja 4

Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja “Persentase Perkara Pidana Yang Di selesaikan Tepat Waktu” adalah perbandingan jumlah perkara Pidana yang di selesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara Pidana yang di selesaikan tahun berjalan. Disini yang merupakan input adalah perkara yang di selesaikan dalam bulan berjalan, dan merupakan outputnya adalah perkara yang di selesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.

Pada tahun 2022 realisasi persentase perkara Pidana yang diselesaikan

tepat waktu sebesar 100% dan secara umum realisasi ini mempunyai capaian kinerja sebesar 100 %, dimana realisasi di tahun 2022 sangatlah baik karena dapat melebihi target, dan dari 91 perkara telah dapat diselesaikan pada tepat waktu, karena penyelesaian perkara tidak melebihi 3 bulan.

Berikut realisasi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sejak tahun 2020-2022. Ditabel ini menunjukkan penyelesaian perkara di bulan berjalan dan tepat waktu di tahun berjalan.

Tabel.7 Sasaran 1 Indikator Kinerja 4

| Indikator Kinerja | Tahun | Jumlah Perkara Pidana Yang di Selesaikan | Jumlah Perkara Pidana Yang di Selesaikan Tepat Waktu | Target | Realisasi | Capaian |
|--|-------|--|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Perkara Pidana yang di selesaikan tepat waktu | 2020 | 137 | 118 | 92,18% | 84,77% | 91,96% |
| | 2021 | 121 | 118 | 84,77% | 97,52% | 115,04% |
| | 2022 | 91 | 86 | 84,77% | 93,40 | 101,80 |

Sasaran 1 Indikator Kinerja 5

Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja "Persentase Perkara Perdata Yang Di selesaikan Tepat Waktu" adalah perbandingan jumlah perkara Perdata yang di selesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara Perdata yang di selesaikan tahun berjalan. Disini yang merupakan input adalah perkara yang di selesaikan dalam bulan berjalan, dan merupakan

outputnya adalah perkara yang di selesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.

Pada tahun 2022 realisasi persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 83,72 % dan secara umum realisasi ini mempunyai capaian kinerja yang sangat baik karena dapat melampaui target

Tabel.8 Sasaran 1 Indikator Kinerja 5

| Indikator Kinerja | Tahun | Jumlah Perkara Perdata Yang di Selesaikan | Jumlah Perkara Perdata Yang di Selesaikan Tepat Waktu | Target | Realisasi | Capaian |
|---|-------|---|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Perkara Perdata yang di selesaikan tepat waktu | 2020 | 45 | 38 | 79,44% | 84,44% | 106,34% |
| | 2021 | 36 | 43 | 84,44% | 83,72% | 99,14% |
| | 2022 | 55 | 53 | 84,44% | 96,36% | 114,11% |

Sasaran 1 Indikator Kinerja 6

Persentase Perkara Tipikor Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja "Persentase Perkara Tipikor Yang Di selesaikan Tepat Waktu" adalah perbandingan jumlah perkara Tipikor yang di selesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara Tipkor yang di selesaikan tahun berjalan. Disini yang merupakan input adalah perkara yang di selesaikan dalam bulan berjalan, dan merupakan outputnya adalah

perkara yang di selesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.

Pada tahun 2022 realisasi persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu sebesar 90 % dan secara umum realisasi ini mempunyai capaian kinerja yang sangat baik karena capaian mencapai 100% sesuai yang ditargetkan.

Tabel.9 Sasaran 1 Indikator Kinerja 6

| Indikator Kinerja | Tahun | Jumlah Perkara Tipikor Yang di Selesaikan | Jumlah Perkara Tipikor Yang di Selesaikan Tepat Waktu | Target | Realisasi | Capaian |
|---|-------|---|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Perkara Tipikor yang di selesaikan tepat waktu | 2020 | 6 | 5 | 92,3% | 90% | 97,5% |
| | 2021 | 9 | 10 | 90% | 90% | 100% |
| | 2022 | 14 | 14 | 83,33% | 100% | 120% |

SASARAN 2 : PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM

Sasaran ini merupakan Kepuasan masyarakat terhadap hasil putusan banding, yang mempunyai indikator kinerja "Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi" secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas masyarakat terhadap putusan banding.

Indikator kinerja "Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi"

adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara.

Ditahun 2022 yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi realisasinya adalah sebesar 52 % dari jumlah Perkara dari

Pengadilan Negeri sebesar 160 perkara minutasi.

Tahun 2021-2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini perkembangan 3 tahun terakhir penurunan upaya hukum yang tidak mengajukan kasasi.

Tabel.10 Sasaran 2 Indikator Kinerja 1

| Indikator Kinerja | Tahun | Jumlah Perkara Putus Tk.Banding | Yang Mengajukan Kasasi | Yang Tidak Mengajukan Kasasi | Target | Realisasi | Capaian |
|---|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 2020 | 121 | 60 | 121 | 56,12% | 75,15% | 133,90% |
| | 2021 | 138 | 76 | 199 | 75,15% | 83,43% | 111,02% |
| | 2022 | 152 | 104 | 48 | 75,15% | 31,57% | 69,19% |

Analisis perbandingan capaian dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penurunan upaya hukum kasasi dari jumlah perkara putus, ini juga jumlah perkara banding yang masuk mempengaruhi penurunan upaya hukum kasasi ini.

SASARAN 3 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN

Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja "Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding adalah perbandingan jumlah responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding dengan jumlah responden Tingkat Pertama.

Dalam pengukuran indikator ini berdasarkan Permenpan nomor Kep/25 /M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat unit pelayanan instansi Pemerintah sesuai peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada tahun 2022 Indikator index kepuasan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap layanan Pengadilan Tinggi Gorontalo mengalami peningkatan yaitu sebesar 93,25% dengan capaian 103,51%. Ada kenaikan sekitar 3,25% kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan masyarakat. Pelayanan survey dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat secara online, yang juga dapat di akses pada website Pengadilan Tinggi Gorontalo.



SASARAN 4 : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Pada sasaran ke empat ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sampai dimana efektifitas Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam melaksanakan pengawasan ataupun pemeriksaan secara efektif dan efisien. Sasaran ini menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama.

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditidaklanjuti
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti

Sasaran 4 Indikator Kinerja 1

Persentase pengaduan masyarakat yang ditidaklanjuti

Hasil prosentase diperoleh dari :

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Pengaduan yang masuk ditahun 2022 ada 11 perkara dan di masukkan kedalam aplikasi SIWAS.

Dari pengaduan yang masuk yang sudah di tindak lanjuti oleh petugas pengaduan dengan memasukkan pengaduan ini kedalam aplikasi SIWAS, sehingga pencapaiannya 100 %.

Tabel. 13. Penanganan Pengaduan Yang Dilaporkan dalam 3 tahun Tahun 2020-2022

| Tahun | Pengaduan Dilaporkan | Pengaduan Ditindak Lanjut | Realisasi | Target | Capaian |
|-------|----------------------|---------------------------|-----------|--------|---------|
| 2020 | 2020 | 4 Pengaduan | 4 | 100% | 80% |
| 2021 | 2021 | 11 Pengaduan | 10 | 90,9% | 100% |
| 2022 | 2022 | 4 Pengaduan | 4 | 100 % | 100% |

Sasaran 4 Indikator Kinerja 2

Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Di Tindak Lanjuti

Hasil prosentase diperoleh dari :

- Perbandingan Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindak lanjuti dengan Jumlah Kegiatan Pengawasan Yang Dilakukan.
- Pengadilan Tinggi Gorontalo melaksanakan pengawasan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan
- Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam melakukan kegiatan Pengawasan ke 4 (empat) Pengadilan Negeri adalah 2 tahap pada Semester 1 dan Semester 2.

Di tahun 2022 Pengadilan Tinggi Gorontalo melakukan pengawasan Daerah dan Pengawasan Bidang dan semua temuan telah di tindak lanjuti dan telah di buat LHP oleh Hakim Pengawas.

SASARAN 5 : PENINGKATAN KUALITAS SDM

Sasaran ini merupakan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan menggunakan 2 indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
2. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial

Dimana berdasarkan data dari Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi informasi jumlah persentase pegawai yang telah lulus diklat teknis dan diklat non yudisial sebesar 100%.

SASARAN 6 : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENUNJANG OPERASIONAL PERADILAN

Sasaran ini merupakan Peningkatan sarana dan prasarana dengan menggunakan 2 indikator kinerja yaitu :

1. Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional
2. Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran

Adapun jumlah realisasi dari indikator pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional adalah sebesar 99,94% sedangkan indikator pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran sebesar 99,44%.

SASARAN 7 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini merupakan Kecepatan Penyelesaian Perkara yang menggunakan 3 indikator kinerja yaitu :

3. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
4. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
5. Persentase Rasio Majelis Hakim dalam menangani perkara

Sasaran 7 Indikator Kinerja 1

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Indikator Kinerja "Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan jumlah Putusan yang di kirimke PN Pengaju secara lengkap dengan jumlah putusan banding. Ditahun 2022 jumlah putusan banding yang di kirim secara lengkap mencapai 100 % dari jumlah perkara banding seluruhnya 160 perkara.

Tabel 11 Sasaran 7 Indikator Kinerja 1

| Indikator Kinerja | Tahun | Jumlah Putusan | Putusan yang disampaikan lengkap | Target | Realisasi | Capaian |
|--|-------|----------------|----------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap | 2020 | 126 | 126 | 100% | 100% | 100% |
| | 2021 | 174 | 174 | 100% | 100% | 100% |
| | 2022 | 160 | 160 | 100% | 100% | 100% |

Ini menunjukkan tiap tahun putusan banding Pengadilan Tinggi Gorontalo yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju secara lengkap dapat memenuhi target yaitu dengan capaian 100%.

Sasaran 7: Indikator Kinerja 2

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Indikator Kinerja "Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan

- Perbandingan jumlah berkas perkara yang diregister dengan jumlah perkara masuk.
- Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengetahui apakah berkas perkara

yang masuk telah diregister sebelum didistribusikan pada majelis hakim .

Ditahun 2022 jumlah berkas perkara yang diregister yang di distribusikan ke Majelis Hakim mencapai 100 % dari jumlah perkara banding seluruhnya 160perkara.

Sasaran 7 : Indikator Kinerja 3**Persentase Ratio Majelis Hakim yang menangani Perkara**

- Perbandingan jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara masuk
- Indikator kinerja ini bertujuan berapa berkas perkara yang di tangani oleh majelis hakim dari tiap kepaniteraan.
- Penetapan Susunan Majelis Hakim tahun 2022 di Pengadilan Tinggi Gorontalo sesuai SK Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20-U/2175/OT.O1.3/12/2022 tanggal 20 Desember 2022

Tabel 12. Capaian Ratio Majelis Hakim tahun 2022

| Jenis Perkara | Perkara masuk | Jumlah majelis hakim | Ratio | Realisasi | Target | Capaian |
|---------------|---------------|----------------------|-------|-----------|--------|---------|
| Pidana | 91 | 6 | 1:15 | 100% | 100% | 100% |
| Perdata | 55 | 6 | 1:9 | 100% | 100% | 100% |
| Tipikor | 14 | 6 | 1:2 | 100% | 100% | 100% |

sebesar 9 Perkara. Dan semua telah di publish, karena seyogyanya putusan

yang slalu jadi minat masyarakat mencari tawu adalah perkara Tipikor.

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Tinggi Gorontalo tahun 2022 dengan revisi per 28 Desember 2022 pagu anggaran menjadi Rp. 15.819.618.000,- Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Gorontalo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 15.731.901.584,- atau sebesar 99,45%, tapi bila dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi anggaran pada tahun ini tercatat pencapaiannya lebih tinggi.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (LRA) tahun 2022, Alokasi dan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022, Alokasi dan realisasi per program dapat dirinci pada table berikut ini

Tabel. 14
Realisasi Anggaran Per kegiatan Tahun 2022

| No | Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Prosentase (%) |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA | 15.475.118.000,- | 15.387.622.834,- | 99,43 |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana lingkungan MA | 344.500.000,- | 344.278.750,- | 99,94 |
| 3 | Peningkatan Manajemen Peradilan umum | 243.185.000,- | 241.154.400,- | 99,16 |
| JUMLAH | | 16.062.803.000,- | 15.973.055.984,- | 99,44% |

Realisasi sebesar Rp. 15.973.055.984,- adalah biaya-biaya yang mendukung suatu program/kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis/

kegiatan untuk masing-masing Indikator kinerja dan indikator kegiatan.

Untuk penjelasannya sebagai berikut :

1. **Program** : Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan BUA dan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Dana untuk Program dan Kegiatan ini di gunakan untuk sasaran kegiatan :

- a. Peningkatan sisa perkara yang di selesaikan;
- b. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

2. **Program** : Dukungan Manajemen

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Dana untuk Program dan Kegiatan ini di gunakan untuk sasaran kegiatan :

- a. Peningkatan kualitas pengawasan;
- b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan

Tabel. 15

Realisasi Output Layanan Yang Mendukung Program Kegiatan

| output | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Layanan Perkantoran | 15.224.669.000,- | 15.140.173.784,- | 99,45 |
| Layanan Umum | 250.449.000,- | 247.449.050,- | 98,80 |
| Layanan sarana internal | 344.500.000,- | 344.278.750,- | 99,94 |



JL. TINALOGA NO.2 KELURAHAN DULOMO SELATAN
KEC. KOTA UTARA KOTA GORONTALO

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tahun 2022 adalah 5 tahun kedua Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melakukan Evaluasi analisis kinerja berdasarkan RENSTRA 2020-2024, dimana selama 5 tahun pertama ini Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam penyelenggaraan kinerja dihadapi pada pandemic covid 19.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Gorontalo tahun 2022 dalam pencapaiannya menggunakan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama berdasarkan rencana hasil kerja. Setelah diukur tingkat keberhasilannya Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mencapai target dari beberapa Indikator yang ditetapkan,

bahkan ada juga yang melebihi dari target yang ditetapkan.

Keberhasilan dari pencapaian oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak lepas dari beberapa faktor yaitu adanya kebijakan-kebijakan, peningkatan kualitas pengawasan dan Sumber Daya Manusia dan adanya faktor penunjang kegiatan yaitu ketersediaan sarana dan prasarana kantor.

Dalam beberapa hal terjadi penurunan dalam hal realisasi beberapa indikator ini di pengaruhi oleh adanya jumlah perkara yang masuk menjelang akhir tahun yang sulit di prediksi sehingga menyebabkan peningkatan beban sisa perkara yang diselesaikan ditahun 2022.

B. S A R A N

Diharapkan dalam mengatasi suatu kendala-kendala yang terjadi terutama dalam hal pelaksanaan fungsi dan tugas dan kinerja terutama yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran strategis maupun sasaran kegiatan, Pengadilan Tinggi Gorontalo harus lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan.

Upaya yang perlu dilakukan Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam mengatasi kendala tersebut antara lain :

- 1) Meningkatkan lagi kerja sama dan koordinasi antara Pimpinan dan Stafnya dan seluruh komponen Aparatur Pengadilan terutama dalam hal administrasi perkara dan penyelesaian perkara.
- 2) Peningkatan dalam hal pelayanan untuk menguatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
- 3) Memperhatikan dengan seksama terhadap pengawasan internal maupun eksternal.
- 4) Penguatan kinerja dalam hal tugas dan fungsi dari masing-masing SDM.
- 5) Sarana dan Prasarana harus lebih ditingkatkan dalam penunjang pelaksanaan kerja, pelayanan maupun kredibilitas instansi.
- 6) Para SDM harus lebih banyak belajar dalam mengoperasikan aplikasi aplikasi yang tersedia.

